



Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36, Kab. Bandung Barat

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - 395 / KM - 13 / 1990-Tgl. 24 Agustus 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

Nomor : 19/IV/BPR.SMP/2026
Lampiran : 1 (satu) set

Bandung Barat, 30 April 2026

Kepada Yth,
Yth. DPP Perbarindo Pusat dan Media BPR
Komp PARTA II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510

**Perihal : Laporan Tata Kelola (*Self Assessment*) dan Transparansi Tata Kelola
PT. BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2025**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance/GCG) PT BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2025**.

Penyusunan laporan ini telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. **POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat**, sebagaimana telah disesuaikan dalam kerangka penguatan tata kelola dan manajemen risiko BPR;
2. **SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat**;
3. **POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR**, sebagai bagian integral dalam penerapan tata kelola yang baik;
4. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang relevan, termasuk penguatan fungsi kepatuhan, audit intern, serta transparansi kondisi keuangan BPR.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta sebagai sarana evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR SINAR MAS PELITA



PT. BPR SINAR MAS PELITA

Taufiq Nugraha
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sinar Mas Pelita

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039284-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600189-30042026163109

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

adeng141295@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-30 16:31:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



Kantor Pusat Padalarang

Jalan Raya Padalarang No. 36 Kertamulya, Kab. Bandung Barat 40553, Telp. : 022-6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP-395/KM - 13 / 1990 Tgl. 24 Agustus 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Sinar Mas Pelita selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

BANDUNG BARAT, 30 Januari 2025

PT. BPR Sinar Mas Pelita

Menyetujui,

Julia Intan Sitorus
Komisaris Utama



Taufiq Nugraha
Direktur Utama



Kantor Pusat Padalarang

Jalan Raya Padalarang No. 36 Kertamulya, Kab. Bandung Barat 40553, Telp. : 022-6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP-395/KM - 13 / 1990 Tgl. 24 Agustus 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, berjalan dengan cukup baik.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian cukup baik.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, berjalan dengan baik.

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Implementasi indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, di BPR menunjukkan kondisi baik.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan pencapaian baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dinilai baik.

11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, BPR tergolong baik.
----	---	------	---

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Pemegang Saham telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan, termasuk melalui penyelenggaraan RUPS dan penetapan kebijakan strategis Bank. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional harian serta mendukung penerapan tata kelola yang baik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam pendokumentasian keputusan dan pemantauan tindak lanjut hasil RUPS.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, berjalan dengan baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.</p> <p>3. BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dengan penilaian baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, berjalan dengan cukup baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian cukup baik.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Implementasi indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan pencapaian baik.</p> <p>3. Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> <p>4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, BPR tergolong baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dinilai telah terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Sebagian Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, BPR tergolong sebagian terpenuhi.

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Sebagian Terpenuhi	Implementasi indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Sebagian Terpenuhi	Implementasi indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Sebagian Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, BPR tergolong baik.

11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Cukup Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
----	--	------------	---

12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan pencapaian baik.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR berada dalam kondisi baik.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Cukup Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan pencapaian cukup baik.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.

17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Implementasi indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di BPR menunjukkan kondisi baik.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Cukup Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian cukup baik.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, pada BPR dinilai baik.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Cukup Baik	Indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Cukup Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, berjalan dengan tidak baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, BPR tergolong cukup baik.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, dinilai baik.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR dinilai cukup baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	BPR memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan , pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, indikator Terdapat peningkatan kemampuan , pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil

			sesuai ekspektasi stakeholders, yang dinilai cukup baik.
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	1 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai ketentuan yang berlaku serta mendukung penerapan tata kelola yang baik. Direksi menetapkan kebijakan, mengawasi operasional, dan memastikan penerapan prinsip kehati- hatian. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal dan konsistensi tindak lanjut atas hasil evaluasi dan pengawasan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	Struktur Direksi telah dibentuk sesuai ketentuan dan didukung dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Direksi juga telah memiliki kebijakan, pedoman kerja, serta perangkat pendukung yang memadai untuk menjalankan fungsi pengelolaan Bank dan mendukung penerapan tata kelola yang baik.
2)	Faktor Negatif
	Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta pedoman kerja Direksi belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penilaian atas kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif mendukung pengelolaan Bank.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Direksi telah menjalankan proses tata kelola melalui pengambilan keputusan strategis, pelaksanaan rapat Direksi, serta pengawasan terhadap kegiatan operasional, kepatuhan, dan manajemen risiko. Koordinasi dengan Dewan Komisaris dan unit kerja terkait juga telah dilakukan dalam rangka mendukung penerapan prinsip kehati-hatian.
2)	Faktor Negatif
	Efektivitas pengawasan Direksi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengendalian internal belum sepenuhnya optimal. Selain itu, tindak lanjut atas hasil evaluasi, temuan audit, dan rekomendasi pengawasan masih memerlukan peningkatan konsistensi dan ketepatan waktu.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Hasil penerapan tata kelola oleh Direksi secara umum telah mendukung kelangsungan usaha, stabilitas operasional, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Kebijakan dan keputusan Direksi memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan kegiatan usaha Bank.
2)	Faktor Negatif
	Hasil tata kelola tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko secara menyeluruh, sehingga masih terdapat potensi risiko operasional yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari Direksi.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Sebagian Terpenuhi	Indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dinilai sebagian terpenuhi.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dengan penilaian telah terpenuhi.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Sebagian Terpenuhi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, berjalan dengan sebagian terpenuhi.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, dengan pencapaian baik.

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Cukup Baik	Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dinilai cukup baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR berada dalam kondisi baik.

12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dinilai baik.
----	---	------	---

13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	Implementasi indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Cukup Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai cukup baik.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dinilai baik.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.

7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Tidak Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan tidak baik karena komite baru dibentuk 1 november 2025.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Baik	Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi tidak baik dikarenakan kebijakan belum diterapkan secara keseluruhan

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dengan penilaian baik.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian cukup baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	2 Indikator

Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	12 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	2 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Secara umum, penerapan tata kelola telah berjalan dan didukung oleh struktur, proses, serta hasil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu menopang pelaksanaan kegiatan usaha secara relatif terkendali dan akuntabel; namun demikian, efektivitas tata kelola masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguatan kualitas implementasi, konsistensi proses, serta optimalisasi peran organ tata kelola agar mampu merespons dinamika risiko, kompleksitas usaha, dan tuntutan perbaikan berkelanjutan secara lebih proaktif dan berkesinambungan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	Struktur dan infrastruktur tata kelola telah tersedia secara memadai dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku, ditandai dengan keberadaan organ tata kelola, kebijakan, pedoman, serta perangkat pendukung yang relatif lengkap dan terdokumentasi, sehingga mampu menjadi landasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara berjenjang dan terarah.
2)	Faktor Negatif
	Meskipun struktur dan infrastruktur telah tersedia, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, khususnya terkait penyalarsan peran antar fungsi, penguatan independensi, serta pemutakhiran kebijakan dan pedoman yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika risiko, kompleksitas usaha, dan perkembangan regulasi terkini.

B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Proses tata kelola pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan dan prosedur internal, termasuk mekanisme pengambilan keputusan, pelaporan, serta pengawasan, sehingga mendukung penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam kegiatan operasional sehari-hari.
2)	Faktor Negatif
	Dalam pelaksanaannya, proses tata kelola masih menunjukkan kelemahan pada aspek konsistensi, kedalaman analisis, serta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi, yang mengindikasikan perlunya penguatan disiplin pelaksanaan, dokumentasi proses, dan peran aktif organ tata kelola dalam memastikan efektivitas implementasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Hasil penerapan tata kelola secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas operasional, pengendalian risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan, tercermin dari berjalannya kegiatan usaha secara relatif terkendali dan minimnya permasalahan material yang berdampak signifikan.
2)	Faktor Negatif
	Namun demikian, hasil tata kelola belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam menghasilkan peningkatan kualitas pengambilan keputusan, mitigasi risiko secara proaktif, serta perbaikan berkelanjutan yang terukur atas kelemahan yang masih berulang.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Cukup Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, dengan pencapaian cukup baik.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, dengan pencapaian tidak baik.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, dengan penilaian tidak baik.

6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, berjalan dengan tidak baik.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Tidak Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai tidak baik.
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Tidak Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, pada BPR dinilai tidak baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, pada BPR dinilai cukup baik.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai cukup baik.

11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Kurang Baik	Indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, pada BPR indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, dinilai kurang baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		5 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Tidak Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Tidak Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Kurang Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite			
Nilai Faktor			
Nilai 3 (Cukup Memadai)			
Penjelasan Nilai Faktor			

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Masing- masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, dengan pencapaian cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, dengan pencapaian tidak baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, dengan penilaian tidak baik. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, berjalan dengan tidak baik. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai tidak baik. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, pada BPR dinilai tidak baik. faktor penyebab tidak baik dikarenakan komite tersebut baru terbentuk pada 1 november 2025.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, pada BPR dinilai cukup baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, pada BPR indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, dinilai kurang baik.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi baik.

4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR saat ini dinilai baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian cukup baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
- b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.
- c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk

	<p>potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian cukup baik.</p>

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sebagian Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian sebagian terpenuhi karena pejabat eksekutif masih merangkap dengan fungsi manrisk dan legal
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan baik.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Cukup Baik	Indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Cukup Baik	Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. dengan dilaksanakannya post mortem.

9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.

b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.

Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian sebagian terpenuhi karena pejabat eksekutif masih merangkap dengan fungsi manrisk dan legal
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

	<p>kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik.</p> <p>2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dinilai cukup baik.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. dengan dilaksanakannya post mortem.</p>

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dinilai telah terpenuhi.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.

5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sebagian Terpenuhi	Indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dinilai sebagian terpenuhi dikarenakan SKAI hanya berjumlah 4 orang dengan jumlah kantor yang harus diperiksa sebanyak 25 kantor.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR dinilai baik.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dengan pencapaian baik.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	Penilaian terhadap indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dimiliki BPR adalah baik.

9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan penilaian cukup baik.
---	---	------------	--

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dinilai telah terpenuhi. 3. Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 4. Implementasi indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dinilai sebagian terpenuhi dikarenakan SKAI hanya berjumlah 4 orang dengan jumlah kantor yang harus diperiksa sebanyak 25 kantor.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada

	<p>seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dengan pencapaian baik.</p> <p>3. Penilaian terhadap indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan penilaian cukup baik.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>2. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), BPR tergolong baik.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik.

5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.
---	---	------	---

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:
 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A.	Struktur dan Infrastruktur

1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi namun masih merangkap pada fungsi tugas kepatuhan dan legal
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Sebagian Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi.
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sebagian Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.

5	<p>Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	Cukup Baik	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian cukup baik.</p>
6	<p>Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	Cukup Baik	<p>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dinilai cukup baik.</p>

7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR dinilai cukup baik.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Cukup Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian cukup baik.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan cukup baik.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, berjalan dengan cukup baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong cukup baik.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Kurang Baik	Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah kurang baik karena masih dalam proses penyempurnaan dan penyesuaian dari sisi penggunaan

14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Kurang Baik	Indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR saat ini dinilai kurang baik.
----	--	-------------	---

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, pada BPR berada dalam kondisi baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Cukup Baik	BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dinilai cukup baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	10 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</p> <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor positif atau nihil.
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi namun masih merangkap pada fungsi tugas kepatuhan dan legal</p> <p>2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen</p>

	<p>risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi.</p> <p>3. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.</p>
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian cukup baik.</p> <p>3. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dinilai cukup baik.</p> <p>4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR dinilai cukup baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian cukup baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah kurang baik karena masih dalam proses penyempurnaan dan penyesuaian dari sisi penggunaan</p> <p>2. Indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR saat ini dinilai kurang baik.</p>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>3. BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dinilai cukup baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sebagian Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR dinilai sebagian terpenuhi karena belum melakukan pengkinian secara berkala
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Cukup Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian cukup baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan pencapaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.

5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Poses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
- b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan segera.
- c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor positif atau nihil.
2)	Faktor Negatif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR dinilai sebagian terpenuhi karena belum melakukan pengkinian secara berkala
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian cukup baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.</p> <p>2. BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, berjalan dengan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, berjalan dengan cukup baik.

5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai cukup baik.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.

7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR memiliki indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai cukup baik.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Cukup Baik	Implementasi indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR dinilai baik.

11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Implementasi indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, berjalan dengan cukup baik. 2. BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat

	<p>laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai cukup baik.</p> <p>3. Indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</p> <p>4. BPR memiliki indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai cukup baik.</p> <p>5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>2. BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Cukup Baik	Indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dinilai cukup baik.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan penilaian baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR berada dalam kondisi baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Sinar Mas Pelita mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2,21 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2,52(Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2,46 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3,33 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2,04 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2.36 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2.22 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2,00 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2,81 (Cukup Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2,17 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2,67 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2,21 (Memadai)
Peringkat Komposit		2,44
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

- 1) Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan;
- 2) BPR memiliki struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan;
- 3) Implementasi proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai;
- 4) Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai;
- 5) BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai memadai;
- 6) Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai memadai;
- 7) Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan memadai;
- 8) Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai

Faktor Negatif

- 1) Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan
- 2) Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai masih terpenuhi sebagian.,Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan masih terpenuhi sebagian;
- 3) Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.,Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian cukup memadai.,Proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR saat ini dinilai tidak memadai;
- 4) Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian cukup memadai;
- 5) Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR tergolong cukup memadai;
- 6) 5) Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SINAR MAS PELITA
TAHUN 2025**



**Jl. Raya Padalarang No.36, Kertamulya, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553
TELEPON: 022-6809417**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Sinar Mas Pelita
Alamat	Jl. Raya Padalarang No 36, Kab. Bandung Barat
Nomor Telepon	(022) 6809417

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada PT BPR Sinar Mas Pelita sepanjang tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari peningkatan kinerja Bank di tengah dinamika perekonomian dan sektor usaha yang masih menghadapi berbagai tantangan.

PT BPR Sinar Mas Pelita memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2024, guna memastikan pengelolaan Bank yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Sebagai lembaga keuangan yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, PT BPR Sinar Mas Pelita secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran (Fairness) dalam setiap kegiatan usahanya. Penerapan prinsip tersebut didukung oleh komitmen seluruh organ Bank dalam mewujudkan visi sebagai penyedia layanan perbankan yang terpercaya, dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi nasabah dan pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, penerapan Tata Kelola di PT BPR Sinar Mas Pelita mengacu pada tiga pilar utama, yaitu struktur, proses, dan hasil (outcome) Tata Kelola, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku. Struktur mencakup kecukupan dan efektivitas organ Tata Kelola, proses mencerminkan pelaksanaan fungsi dan mekanisme kerja yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, sedangkan hasil mencerminkan kualitas implementasi Tata Kelola yang memberikan nilai tambah dan perlindungan bagi pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2024 dan ke depan, PT BPR Sinar Mas Pelita akan terus memperkuat penerapan Tata Kelola secara konsisten, terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, berkelanjutan, serta selaras dengan ketentuan regulator.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Peringkat komposit GCG BPR berada pada kategori "Baik" (2,44), yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola telah memadai dan mendukung operasional Bank secara terkendali. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek efektivitas pengawasan, manajemen risiko, dan kualitas implementasi agar tata kelola dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Jabatan	Direktur tama



Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menetapkan perencanaan strategis serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan dan kemajuan perusahaan.
2. Melakukan evaluasi dan supervisi atas pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
4. Mengawasi pelaksanaan anggaran serta memastikan tata kerja dan prosedur unit kerja berjalan sesuai ketentuan.
5. Menetapkan kebijakan kepengurusan dan operasional Perseroan.
6. Mengatur kebijakan kepegawaian, termasuk penetapan gaji, penghargaan, sanksi, dan pemberhentian pegawai sesuai ketentuan.
7. Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.
8. Mengajukan usulan hapus buku kredit bermasalah kepada Dewan Komisaris sesuai mekanisme yang berlaku.
9. Melakukan pengelolaan aset, tindakan hukum, serta kerja sama dengan pihak lain sesuai peraturan dan Anggaran Dasar.
10. Memastikan penerapan prinsip Tata Kelola (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.
11. Menyusun rencana strategis, termasuk RJPP dan RKAT, serta rencana kerja lainnya.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan serta laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang diaudit.
13. Memberikan penjelasan kepada RUPS serta menyampaikan laporan keuangan yang telah disahkan.
14. Menyusun sistem akuntansi berbasis pengendalian internal dan pemisahan fungsi.
15. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan pihak terkait sesuai ketentuan.
16. Menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
17. Memberikan informasi dan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan.
18. Memutuskan pemberian kredit sesuai batas kewenangan yang ditetapkan.
19. Mengkoordinasikan dan memastikan seluruh anggota Direksi menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
20. Memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Jabatan	Direktur Operasional

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengkoordinir kegiatan setiap bagian seksi unit operasional Bank.
2. Melakukan pengawasan terhadap tugas dalam kantor.
3. Mengadakan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank.
4. Bekerja sama dengan bagian kredit dalam menyelesaikan kredit bermasalah.
5. Mengganti/ mengambil alih tugas dan wewenang Direktur Utama apabila berhalangan tetap.
6. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.

3.	Nama	Siti Rijah
	Jabatan	Direktur Kepatuhan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:



1. Melakukan pengawasan terhadap tugas dalam kantor
2. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan-laporan keuangan terutama Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
3. Mengadakan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank
4. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja dan prosedur dari unit-unit di kantor menurut ketentuan yang berlaku serta menilai efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan tata kerja tersebut
5. Menyusun kebijakan dan sistem prosedur yang akan digunakan untuk ketentuan Intern Bank
6. Melaporkan kepada Direksi terkait dan Dewan Komisaris secara tertulis apabila ada unit kerja atau karyawan² yang melanggar kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada unit kerja atau karyawan yang melakukan pelanggaran
7. Menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan eksternal
8. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
10. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko bersama HRD telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi sepanjang 2025, sebagaimana tercermin dalam laporan kegiatan yang terdokumentasi.
2. Selain bersama HRD, sosialisasi juga dilakukan secara mandiri melalui program post mortem di Kantor Pusat (Padalarang) serta Cabang Bandung, Pangandaran, Ciamis, Banjar, dan Cilacap.
3. Dalam kegiatan tersebut disampaikan penguatan budaya tone at the top melalui materi Strategi Anti Fraud dan keaslian dokumen, meskipun role model masih bersifat kolektif dan belum individu.
4. Satuan Kerja Kepatuhan mendorong komunikasi terbuka melalui sosialisasi, pelatihan, dan post mortem, sehingga karyawan dapat menyampaikan potensi pelanggaran dan risiko operasional.
5. Penilaian kepatuhan belum dilakukan secara individu, namun dilakukan secara kolektif pada tingkat kantor melalui evaluasi kegiatan operasional.
6. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara proaktif memantau perubahan regulasi dan tren risiko, serta menindaklanjuti dengan revisi kebijakan internal.
7. Koordinasi dengan Audit Intern telah dilakukan untuk pengawasan dan tindak lanjut hasil audit guna memastikan perbaikan berkelanjutan.
8. Pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan hapus buku kredit.
9. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan telah dilaksanakan di beberapa cabang, antara lain di Bandung, Ciamis, dan Tambun, dengan sasaran guru, siswa, PNS/non-PNS, serta masyarakat umum.
10. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan CSR, efisiensi operasional (penghematan listrik, air, penggunaan kertas ulang), serta penggunaan kendaraan hybrid.
11. Pengkinian data nasabah ditargetkan sebanyak 15.892 nasabah, dengan realisasi 2.179 nasabah (13,71%), termasuk nasabah risiko rendah sebesar 588 nasabah (15,81%).

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		



1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.
6. Tugas-Tugas Pokok Komisaris Utama :
 - a. Meninjau secara luas dan menyeluruh atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik
 - b. Meninjau ulang masalah ekonomi makro dan keuangan
 - c. Berkomunikasi dengan pemegang saham pengendali sehubungan dengan hal hal yang melibatkan pemegang saham ; dan
 - d. Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi
 - e. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana bisnis terhadap rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Menindaklanjuti hasil temuan audit Intern dan ekstern

2.	Nama	Teti Herniawati
	Jabatan	komisaris independent

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan



5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.
6. Tugas-Tugas Pokok Komisaris
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan;
 - b. Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati hatian;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap keputusan keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi perusahaan; dan
 - d. Memberikan nasihat dalam masalah hukum.

3.	Nama	Jhonsen Siagian
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.
6. Tugas-Tugas Pokok Komisaris
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan;
 - b. Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati hatian;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap keputusan keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi perusahaan; dan
 - d. Memberikan nasihat dalam masalah hukum.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepatuhan serta manajemen risiko melalui program pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh karyawan, mencakup pemahaman regulasi, kebijakan internal, serta simulasi dan studi kasus operasional.
2. Mendorong komitmen manajemen puncak dalam membangun budaya kepatuhan dan sadar risiko, dengan menjadikan pimpinan sebagai role model serta memperkuat penerapan tone at the top.
3. Menciptakan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman serta mendorong komunikasi dua arah untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan risiko.
4. Mengintegrasikan aspek kepatuhan dan manajemen risiko dalam penilaian kinerja karyawan, termasuk evaluasi tingkat kepatuhan terhadap prosedur serta kontribusi



dalam pengelolaan risiko.

5. Melakukan pemantauan secara proaktif terhadap perubahan regulasi dan tren risiko industri, serta menyesuaikan kebijakan dan prosedur internal agar tetap relevan dan sesuai ketentuan.
6. Memperkuat kolaborasi antara fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal untuk mengidentifikasi kelemahan serta memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan efektif.
7. Melaksanakan pemantauan kegiatan operasional penting secara berkala, meliputi hapus buku kredit, edukasi dan literasi kepada nasabah, implementasi keuangan berkelanjutan, serta penginian data nasabah.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	01. Komite Audit
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas: Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan proses pelaporan. Mengawasi pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Menelaah kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Tanggung Jawab: Memastikan integritas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern. Menindaklanjuti temuan audit serta memastikan perbaikan dilakukan. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
	Jumlah Rapat	1
	Program Kerja Komite: komite belum memiliki program kerja karena baru terbentuk 1 november 2025	
	Realisasi Program Kerja Komite: -	
2.	Komite	02. Komite Pemantau Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas: Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan implementasi manajemen risiko. Memantau pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kinerja satuan kerja terkait. Tanggung Jawab: Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait perbaikan manajemen risiko. Memastikan Direksi menjalankan pengelolaan risiko secara efektif.
	Jumlah Rapat	1
	Program Kerja Komite: komite belum memiliki program kerja karena baru terbentuk 1 november 2025	
	Realisasi Program Kerja Komite: -	



3.	Komite	03. Komite Remunerasi dan Nominasi
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas: Mengevaluasi kebijakan remunerasi berdasarkan kinerja dan prinsip kewajaran. Menyusun sistem dan prosedur pemilihan/penggantian Direksi dan Komisaris. Mengidentifikasi dan merekomendasikan calon pejabat strategis. Tanggung Jawab: Menjamin sistem remunerasi adil, kompetitif, dan berbasis kinerja. Menjamin proses nominasi dilakukan secara objektif dan transparan. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
	Jumlah Rapat	1
Program Kerja Komite: komite belum memiliki program kerja karena baru terbentuk 1 november 2025		
Realisasi Program Kerja Komite: -		

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:
 Seluruh Komite baru dibentuk pada 01 November 2026

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Frangky Haryanto Parapat
	Keahlian	kemampuan analisis hukum dan kepatuhan, pengungkapan serta investigasi indikasi fraud, serta penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Pengalaman panjang di bidang penegakan hukum juga memperkuat ketajaman dalam mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan rekomendasi pengawasan yang objektif dan independen
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	02. Anggota Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya



2.	Nama Anggota Komite	Edwin Erik Ekstrada Sitorus
	Keahlian	pengawasan internal, analisis risiko, dan kepatuhan, yang diperoleh dari pengalaman sebagai pimpinan dan pengawas koperasi. Kompetensi tersebut mendukung pelaksanaan fungsinya di BPR, khususnya dalam memantau profil risiko, mengevaluasi pengendalian internal, serta memastikan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya	
3.	Nama Anggota Komite	Erikson Sitanggang
	Keahlian	bidang audit, akuntansi, perpajakan, serta manajemen risiko dan tata kelola. Yang bersangkutan memiliki pengalaman profesional yang kuat pada Kantor Akuntan Publik, sehingga memiliki kemampuan dalam melakukan telaah laporan keuangan, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan regulator. Di samping itu, kompetensi di bidang perpajakan memperkuat kapasitas dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan memastikan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh. Pengalaman dalam fungsi Audit dan Risk Committee juga menunjukkan kemampuan dalam memberikan pandangan yang objektif dan independen, serta menyusun rekomendasi strategis terkait penerapan manajemen risiko dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	



	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
4.	Nama Anggota Komite	AA Yusep Muharam
	Keahlian	merupakan kepala bagian HRD yang dalam fungsinya melakukan
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak
5.	Nama Anggota Komite	Teti Herniawati
	Keahlian	memiliki integritas, independensi, kemampuan analitis yang kuat, pemahaman regulasi, serta pengalaman di sektor jasa keuangan, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang objektif dan strategis dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagaimana tugas utama sebagai komisaris Independt
	Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
6.	Nama Anggota Komite	Julia Intan Sitorus
	Keahlian	kemampuan dalam pengawasan strategis, evaluasi kinerja, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), didukung oleh pengalaman di bidang audit internal serta perannya sebagai



	Komisaris Utama. Dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, yang bersangkutan mampu menilai efektivitas manajemen, mengevaluasi struktur organisasi, serta memastikan proses nominasi dan kebijakan remunerasi berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku.
Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Persentase Kepemilikan (%)	6,48
3.	Nama	Siti Rijah
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Persentase Kepemilikan (%)	6,11
2.	Nama	Tet Herniawati
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Jonhson Siagian
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR



1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Siti Rijah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Teti Herniawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Jonhson Siagian
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT PUTRA MANDIRI POLIN



	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT PANGANDARAN PUTRA
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT SOGAS INDAH PERDANA
	Persentase Kepemilikan (%)	12,00
4.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BETHESDA HOSPITAL INDONESIA
	Persentase Kepemilikan (%)	5,00
5.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT LINGGAJATI EKAKARSA
	Persentase Kepemilikan (%)	9,90

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT LINGGAJATI EKAKARSA
	Persentase Kepemilikan (%)	9,90
2.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT PUTRA MANDIRI POLIN
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
3.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BETHESDA HOSPITAL INDONESIA
	Persentase Kepemilikan (%)	5,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada



2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ibu Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	ibu Julia Intan sitorus,, IbuDince Sinaga
3.	Nama	Siti Rijah
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Bapak Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
2.	Nama	Teti Herniawati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
3.	Nama	Johnson Siagian
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada



Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Dince Sinaga
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Bapak Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ibu Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu Dince Sinaga - Ibu Parulian Debby - Kakak, Ibu Julia Sitorus - adik, Ibu Julita Sitorus - Adik, Bpk Harbangan Sitorus - Paman, Bpk Mangantar Sitorus - Paman, Ibu Mutiara Siagian - Nenek, Bpk Pintor Sitorus - Paman, Ibu Mintaria Sitorus - Tante, Bpk.Hamrin Malo - Paman, Bpk Poltak Sitorus - Paman, Ibu Tiamin Sitorus - Tante, Ibu Minar Sitorus - Tante

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ibu Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu Dince Sinaga - Ibu, Ibu Parulian Debby - Kakak, Ibu Julia Sitorus - adik, Ibu Julita Sitorus - Adik, Bpk Harbangan Sitorus - Paman, Bpk Mangantar Sitorus - Paman, Ibu Mutiara Siagian - Nenek, Bpk Pintor Sitorus - Paman, Ibu Mintaria Sitorus - Tante, Bpk.Hamrin Malo - Paman, Bpk Poltak Sitorus - Paman, Ibu Tiamin Sitorus - Tante, Ibu Minar Sitorus - Tante
3.	Nama	Siti Rijah
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada



Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Bapak Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu Dince Sinaga - Ibu, Ibu Parulian Debby - Kakak, Ibu Julia Sitorus - adik, Ibu Julita Sitorus - Adik, Bpk Harbangan Sitorus - Paman, Bpk Mangantar Sitorus - Paman, Ibu Mutiara Siagian - Nenek, Bpk Pintor Sitorus - Paman, Ibu Mintaria Sitorus - Tante, Bpk.Hamrin Malo - Paman, Bpk Poltak Sitorus - Paman, Ibu Tiamin Sitorus - Tante, Ibu Minar Sitorus - Tante
2.	Nama	Teti Herniawati
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
3.	Nama	Jonhson Siagian
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.032.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji	Rp876.000.000



Komisaris (Rp)

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp) **Rp0**

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem **3 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) **Rp167.863.876**

Jumlah Komisaris Penerima Tantiem **3 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) **Rp107.485.374**

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp) **Rp0**

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan **Rp0**



Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) **Rp0**

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) **Rp0**

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) **Rp0**

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**



Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	8,31 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,07 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,04 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,20 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,30 : 1
-------------	----------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	08 Januari 2025
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	3 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi Realisasi Kinerja Triwulan IV 2024, Progres Pengembangan CBS DOTS & Tindak Lanjut Penerapan POJK 1 tahun 2024, Evaluasi APU PPT dan PPSPM, Penerapan PJK 15 tahun 2024, Penerapan POJK 23 tahun 2024

2.	Tanggal Rapat	07 Februari 2026
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	7 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Hasil Pemeriksaan KAP Tahun Buku 2024
2. Progres dan Keputusan Pelaksanaan Sistem DOTS.
3. Rencana Rotasi, Mutasi dan Demosi
4. Revisi SOP SAF (Strategi Anti Fraud)
5. Pembahasan Rekomendasi dan NOfulen Dekom

3.	Tanggal Rapat	25 April 2025
----	---------------	---------------

	Jumlah Peserta	3 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Evaluasi Kinerja Direksi Triwulan I 2025



2. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dekom
3. Perisapan RUPS tahun nuku 2024
4. Progres Pemenuhan POJK 9 tahun 2024
5. Penerapan SEOJK 2 tahun 2025

4. Tanggal Rapat 23 Mei 2026

Jumlah Peserta 6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembagian Deviden dan Bonus
2. Penghargaan Prestasi Kinerja Cabang Terbaik Tahun Buku 2024
3. Rencana Insentif Penagihan Kredit Bermasalah sebesar 10%
4. Rencana Revisi RBB
5. Rencana Pembukaan Kantos Kas/Sentra Keuangan Khusus
6. Rencana Perubahan Struktur Organisasi
7. Rencana demosi, Rotasi, mutas
8. Lpaoran Fraud KPO
9. Laporan Perkembangan Penanganan Fraud KC Clawii,
10. Laporan perkembangan kasus Fraud KC Garut
11. Pengean Sanksi terhadap karyawan farud tahun 2025
12. penerapan APU PPT.

5. Tanggal Rapat 23 Juni 2026

Jumlah Peserta 7 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Penetapan Pembukaan Biaya Aplikasi CBS
2. Tindak lanjut penanganan kasus Fraud
3. Rotasi, Mutasi demosi dan rekrutmen plncab
4. rencana tindak lanjut hasil pkk direksi

6. Tanggal Rapat 16 Agustus 2026

Jumlah Peserta 6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Perayaan Ulang tahun BPR
2. Kebijakan BBM
3. Pelaporan Kinerja bulan juli 2025
4. progres pengajuan calon direktur utama dan direktur kepatuhan
5. rancangan struktur organisasi
6. Hal-hal lain.

7. Tanggal Rapat 04 September 2026

Jumlah Peserta 7 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Progres penyelesaian fraud
2. pembahasan pemeriksaan khusus KC batujajar
3. Pembahasan staf legal
4. Draft SK Direksi tentang Penganturan pemberian uang bahan bakar kendaraan

8. Tanggal Rapat 01 Oktober 2026

Jumlah Peserta 7 orang



Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan KHP OJK 2024 dan 2025
2. Penempatan server
3. Rencana kajian khusus debitur Yuyun KC Klagenan dan Perkembangan kasus fraud a.n Gesti mustari
4. Manajer Bisnis sebagai alternate pincab KPO
5. Pembahasan rencana pembagian lahan sewa dengan pegadaian (pak mikael)
6. Review Pelaksanaan APU PPT
7. Pembahasan Komite Audit dan Pemantau Risiko

9.	Tanggal Rapat	15 September 2026
	Jumlah Peserta	7 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan KC Batujajar & Kekosongan Pincab
2. Pembahasan Rencana adanya permohonan sewa sebagian lahan oleh pegadaian (pak mikael)
3. Rencana Penmpatan server
4. SK Direksi tentang Pengaturan Uang Bahan Bakar Kendaraan Operasional

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Julia Intan Sitorus
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jonhson Siagian
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Teti Herniawati
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	12 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	7 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	8 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	2 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada	0 kasus



Tahun Sebelumnya	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	3 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	3 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	7 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	11 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	11 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	06 Juni 2025
----	---------------------	--------------



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DKM Masjid
	Penjelasan Kegiatan	Ppenyembelihan hewan qurban
	Jumlah (Rp)	Rp3.600.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	29 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	anak yatim sekita kantor cabang cipeundeuy
	Penjelasan Kegiatan	Santunan bersama anak yatim disekita kantor cabang cipeundeuy
	Jumlah (Rp)	Rp3.885.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	29 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	anak yatim sekitar kantor kas limbangan
	Penjelasan Kegiatan	Santunan Anak Yatim sekita Kantor Kas Lmbangan & kegiatan Donor darah
	Jumlah (Rp)	Rp8.445.381

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Sinar Mas Pelita untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BANDUNG BARAT, 26 Juli 2024

PT. BPR Sinar Mas Pelita

Menyetujui,

Julia Intan Sitorus, S.H.
Komisaris Utama

Taufiq Nugraha, S.E.
Direktur Utama